

PERMASALAHAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN DITINJAU DARI ASPEK PENGELOLAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

PENGELOLAAN tapal batas belum efektif

Penanganan perbatasan selama ini masih belum optimal dan terpadu karena ada tarik menarik kepentingan berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral, maupun vertikal.

rekomendasi

1. Perlu peningkatan infrastruktur
2. Pembangunan PLBN secara bertahap
3. Pengawasan jalur ilegal
4. Penataan peraturan, termasuk RPP Perdagangan
5. Penetapan *exit/entry point* dengan negara tetangga.

PERDAGANGAN

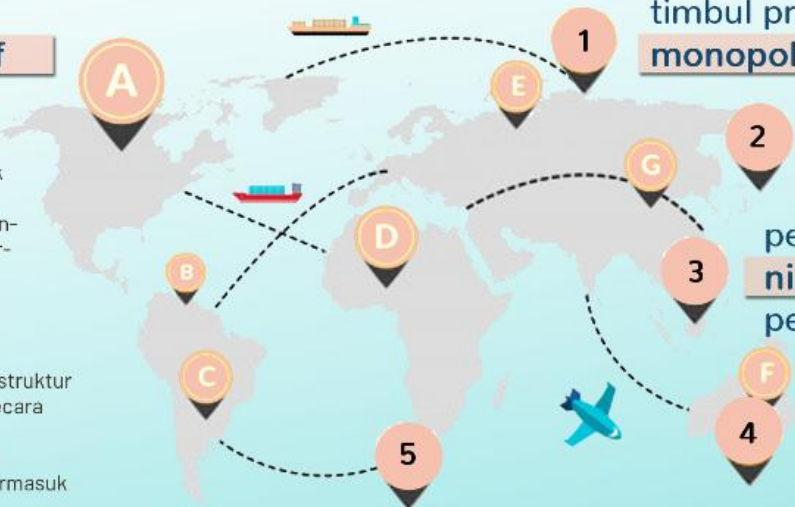
1 timbul praktik monopoli

2 penyelundupan barang dari Malaysia

3 pembatasan nilai belanja perlu direvisi

4 penggunaan rupiah di perbatasan tidak tepat

5 masyarakat tidak terlindungi dari produk Malaysia



PENYELUNDUPAN NARKOTIKA



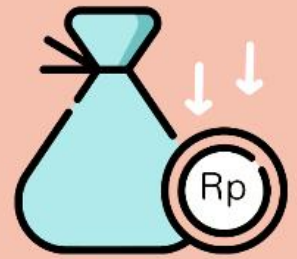
pelaku semakin waspada



pola penyelundupan berubah



pengawasan lemah



anggaran minim

PERDAGANGAN ORANG



minim pengetahuan TPPO



lapangan kerja sulit di Indonesia



oknum fasilitas TPPO



KUALITATIF



OBSERVASI WAWANCARA



UNIT ANALISIS

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- c. Pengadilan Negeri Provinsi Kepulauan Riau
- d. Kantor Imigrasi
- e. Kanwil Bea dan Cukai
- f. Badan Narkotika Nasional Provinsi
- g. Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
- h. BP3TKI
- i. International Organisation of Migrant (IOM)

tentang penelitian